



**KEBIJAKAN SEMU: SEBUAH ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI
PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN KELOMPOK BELAJAR (KEJAR)
PAKET C WIDYA WIYATA MANDALA DI PKBM PRATAMA
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

Intan Ayu Kinasih dan Nurul Fatimah
kinasihituantan@gmail.com ✉

Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2015
Disetujui Mei 2015
Dipublikasikan Juni 2015

Keywords:
Education of Equality,
Kejar Paket C,
Implementation of the
Program

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan program pendidikan kesetaraan Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala di PKBM Pratama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang dalam penerapannya memunculkan penyimpangan-penyimpangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan dilakukan oleh oknum warga belajar dan alumni Kejar Paket C untuk memperoleh ijazah dalam rangka mewujudkan kepentingan pencapaian status sosial yang lebih tinggi dan mobilitas sosial vertikal. Penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Kejar Paket C di Widya Wiyata Mandala merupakan hasil pemberian cap dari konstruksi masyarakat mengenai stigma Kejar Paket C yang dianggap sebagai wujud pendidikan dengan kualitas rendah dan sumber segala kecurangan. Upaya untuk membenahi pelaksanaan terbentur oleh pemberian cap yang sudah terlanjur langgeng mengenai stigma yang keliru.

Abstract

This research attempts to describe the application of programs equality education for Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala in PKBM Pratama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, in application eliciting deviance. This research uses qualitative approach with deep descriptive. The result showed that the form of deviation done by unscrupulous learning residents and the alumnus Kejar Paket C to obtain the certificate in the context of creating the interests of the achievement of social status higher and vertical social mobility. Forms of deception which occur in the application of Kejar Paket C in Widya Wiyata Mandala is the result of labelling of society construction about the stigma Kejar Paket C regarded as a form of education with low quality and source of all fraud. Efforts to fix the implementation of hit by the provision of a stamp already lasting about the stigma that is fallacious.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C7 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: unnessosant@gmail.com

ISSN 2252-7133

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi hak yang mutlak disediakan untuk setiap warga negara Indonesia. Melalui pendidikan diharapkan mampu mengembangkan potensi diri untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Pendidikan tidak hanya terbatas pada bangunan terstruktur yang disebut dengan elitisme sekolah formal, akan tetapi pendidikan dapat ditempuh melalui jalur nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Artinya pendidikan nonformal memang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dengan penekanan pada pengembangan potensi melalui penguasaan ketrampilan fungsional dan pengetahuan yang memadai.

Salah satu bentuk pendidikan nonformal adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan setara SD (Paket A), SMP (Paket B) dan SMA (Paket C) atau yang sederajat kepada warga masyarakat yang oleh karena sesuatu hal kebutuhannya tidak mungkin dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal dan atau mereka dengan sadar memilih menempuh jalur pendidikan nonformal untuk menuntaskan pendidikannya. Satuan pendidikan nonformal khususnya pendidikan kesetaraan diselenggarakan melalui bentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pembangunan pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan kesetaraan mempunyai dua peran strategis yaitu: (1) penunjang suksesnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan program utamanya Paket A setara SD/MI dan Paket B setara SMP/MTs; dan (2) melayani orang dewasa yang ingin memiliki pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) serta pendidikan menengah yang diselenggarakan melalui Program Paket C.

Kemunculan program pendidikan kesetaraan Kejar Paket C menyita perhatian dan banyak diminati warga masyarakat yang membutuhkan pendidikan setara dengan SMA

sederajat. Hal ini dikarenakan Program Kejar Paket C tidak hanya membantu warga masyarakat yang terkendala ke pendidikan formal, akan tetapi juga menjadi solusi bagi peserta didik dari SMA reguler yang tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) untuk dapat mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C tanpa harus mengulang dari awal. Variasi pendidikan nonformal yang berbentuk pendidikan kesetaraan Kejar Paket C mulai banyak bermunculan di tingkat daerah kota-kota di Indonesia. Tidak terkecuali di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Kejar Paket C tersebut bernama Widya Wiyata Mandala, sebagai Kejar Paket C yang pertama didirikan di Kecamatan Batang, Widya Wiyata Mandala banyak diminati warga masyarakat sekitar Kabupaten Batang.

Penelitian mengenai pendidikan nonformal baik yang berbentuk pendidikan kesetaraan maupun yang lainnya sudah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, meskipun penelitian-penelitian terdahulu sangat jarang yang berusaha mengulik penerapan dari sebuah program atau kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan kesetaraan. Winata (2012) yang berjudul "*Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Setara SMA) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Widya Sentana Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2011/2012*". Menyimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui analisis skor-t untuk memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan Kejar Paket C di PKBM Widya Sentana tersebut. Peneliti menarik hasil kesimpulan dari variabel konteks, input, proses dan produk dengan hasil. Serta menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Penelitian tersebut berusaha mengevaluasi program Kejar Paket C di PKBM Widya Sentana, namun peneliti hanya memaparkan hasil melalui analisis skor-t, yang menunjukkan pada efektif dan tidaknya program tersebut. Sehingga pemaparan sangat terbatas pada hasil hitungan.

Tidak beda jauh dengan penelitian Zakiyyah (2008) yang berjudul "*Efektivitas Pelaksanaan Program Kejar Paket C Guna*

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA Sederajat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Malang". Hasil dari penelitian tersebut adalah Program Kejar Paket C di SKB Kota Malang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, yaitu pembentukan panitia penyelenggara Program Kejar paket C, proses pembelajarannya dimulai tanggal 7 Agustus 2007 sampai 30 Oktober 2007, siswa masuk setiap hari Selasa dan Kamis, pukul 13.30-17.00 WIB, dan diadakan *try out* menjelang UNPK tahap 2. Adapun faktor pendukung pelaksanaan Program Kejar Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Malang, tersedianya para tutor yang profesional di bidangnya, lingkungan belajar yang kondusif, dan sarana belajar yang menunjang. Adapun kendala yang dihadapi, yaitu jam masuk kegiatan pembelajaran yang terlalu siang, jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas juga, dan jarak rumah siswa yang cukup jauh dari SKB. Adanya pelaksanaan Program Kejar Paket C yang diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, dinilai cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA sederajat di SKB Kota Malang sebab telah memenuhi kriteria tentang keefektifan kegiatan pembelajaran.

Penelitian lain juga dilakukan Egbezor dan Okanezi (2008) yang berjudul "*Non-Formal Education as a Tool to Human Resource Development: An Assessment*". Penelitian ini menyelidiki hasil dari pendidikan nonformal untuk pengembangan sumber daya manusia di negara bagian Nigeria. Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey, dengan menggunakan angket atau kuesioner dalam rangka pengumpulan data. Penemuan dalam penelitian menunjukkan bahwa secara khusus, pendidikan nonformal melayani sektor industri dengan melatih tenaga kerja yang dibutuhkan. Pusat kemahiran ketrampilan di negara bagian Nigeria telah melatih peserta dalam berbagai ketrampilan dan perdagangan. Ketrampilan dan perdagangan tersebut meningkatkan usaha memperoleh pekerjaan. Sertifikat atau semacam ijazah yang dikeluarkan lembaga pendidikan nonformal bagi lulusan program tersebut dapat digunakan untuk mencari pekerjaan baik di sektor swasta maupun umum. Selain itu,

pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dapat digunakan untuk wirausaha jika orang tersebut berkeinginan. Kadang-kadang jika upah kerja kurang, lulusan program pendidikan nonformal dapat memulainya sendiri dan bahkan menjadi majikan atau bos.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut sebatas penelitian yang berusaha mengevaluasi dan mengkaji pendidikan kesetaraan Kejar Paket C dalam sudut pandang fungsi dan peran Kejar Paket C dalam lingkup "zona nyaman" penerapan sebuah program. Penelitian yang telah penulis lakukan berbeda dengan banyak penelitian sebelumnya karena lebih membahas mengenai *hidden orientation* warga belajar menempuh pendidikan kesetaraan Kejar Paket C, penerapan program pendidikan kesetaraan Kejar Paket C oleh pengelola yang masih melenceng dari aturan, serta kecurangan-kecurangan dibalik pelaksanaan proses pembelajaran Kejar Paket C di lokasi penelitian. *Hidden orientation* yang dimaksudkan dalam penelitian adalah orientasi atau tujuan tersembunyi para warga belajar dalam mengakses pendidikan Kejar Paket C. Orientasi tersembunyi tersebut berupa keinginan warga belajar yang hanya ingin memperoleh selembar ijazah demi kepentingan pencapaian status dan mobilitas sosial yang tinggi. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan *critical research* yang memiliki *standing position* sebagai penelitian lanjutan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

Pendidikan kesetaraan Kejar Paket C memang luput dari perhatian pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan maupun masyarakat sendiri sebagai orang awam. Kejar Paket C masih dianggap sebagai pendidikan alternatif yang jika dilihat dari segi kualitas dipandang sebelah mata dan terlanjur terkonstruksi sebagai pendidikan "seolah-olah sekolah". Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan disorientasi dan disfungsi pada penerapan program tersebut. Tidak terkecuali dalam penerapan Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala. Sasaran Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala yang ditujukan bagi warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan usia yang beragam dan sudah memasuki usia dewasa memicu

kecurangan-kecurangan dibalik penerapan program tersebut.

Menurut penelitian yang telah dilakukan di PKBM Pratama Kelompok Belajar (Kejar) Paket C Widya Wiyata Mandala Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Program Kejar Paket C disalahgunakan bagi warga belajar yang ingin memperoleh kekuasaan. Misalnya bagi warga belajar dengan usia diatas usia belajar pada jenjang SMA sederajat mengikuti Program Kejar Paket C karena memiliki kepentingan untuk memperoleh jabatan sebagai kepala desa, perangkat desa, meningkatkan karir pekerjaan untuk kenaikan golongan, bahkan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau ingin mendaftar pekerjaan yang membutuhkan ijazah SMA.

Orientasi warga belajar yang mengikuti Program Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala hanya untuk mendapatkan selebar ijazah, tidak memperhatikan proses pembelajaran. Banyak warga belajar Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala yang melakukan kecurangan saat proses pembelajaran. Bentuk kecurangan tersebut misalnya para warga belajar jarang mengikuti proses pembelajaran di kelas. Motivasi warga belajar dalam mengikuti proses pembelajaranpun tidak maksimal.

Ironisnya, selama ini belum ada evaluasi dari pemerintah daerah maupun pusat tentang pelaksanaan Program Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala di PKBM Pratama yang ada di Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Hal inilah yang pada akhirnya semakin melanggengkan kecurangan dan penyimpangan dari penerapan program pendidikan kesetaraan Kejar Paket C. Padahal, jika dilihat dari letak administrasi Kejar Paket C tersebut sangat berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Batang, namun pemerintah daerah Kabupaten Batang mengesampingkan urusan pendidikan nonformal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif mendalam yang bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan bentuk kecurangan dan

penyimpangan dibalik implementasi program pendidikan kesetaraan Kejar Paket C (kemudian disingkat dengan KPC) Widya Wiyata Mandala. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh penulis melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Penulis terlibat langsung dalam setiap proses pembelajaran dan menjadi warga belajar KPC Widya Wiyata Mandala selama satu bulan. Keterlibatan langsung (observasi partisipatif) yang dilakukan penulis tersebut bertujuan untuk mengamati proses pembelajaran di kelas, kinerja tutor dalam menyampaikan materi pelajaran, keseriusan warga belajar dalam mengikuti pembelajaran, dan mengamati kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan warga belajar, tutor maupun pengelola KPC Widya Wiyata Mandala.

Wawancara mendalam dilakukan penulis sebagai teknik pengumpulan data primer yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat data yang diperoleh melalui observasi pasrtisipatif. Wawancara mendalam dilakukan ke warga belajar, tutor, pendiri, pengelola maupun alumni KPC Widya Wiyata Mandala yang tergolong ke dalam informan utama maupun informan pendukung. Wawancara mendalam berfungsi untuk mendapatkan data mengenai latarbelakang atau alasan *disorientasi* warga belajar dan alumni mengikuti pendidikan KPC Widya Wiyata Mandala. Data sekunder merupakan data pendukung dalam sebuah penelitian. Data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi baik foto-foto yang sesuai dengan fokus penelitian maupun rekaman wawancara.

Terkait dengan penelitian ini, subjek penelitiannya adalah warga belajar di Kelompok Belajar (Kejar) Paket C Widya Wiyata Mandala pada jenjang kelas X, XI, dan XII tahun ajaran 2014/2015. Informan utama dalam penelitian ini adalah 8 orang warga belajar yang diambil secara acak dari kelas XII, 1 orang pendiri PKBM Pratama Kelompok Belajar (Kejar) Paket C Widya Wiyata Mandala dan 1 orang pengurus Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala. Informan pendukung penelitian ini adalah 2 orang tutor di Kelompok Belajar (Kejar) Paket C Widya Wiyata

Mandala, dan 5 orang alumni Kelompok Belajar (Kejar) Paket C Widya Wiyata Mandala.

Selama proses pengumpulan data, penulis banyak sekali mengalami kendala. Proses pembelajaran yang tidak secara rutin ada menyebabkan penulis kesulitan untuk mendekati warga belajar, sebab mereka jarang masuk secara rutin. Sementara ketika penulis mencoba mengulik data kepada para alumni terkait testimony dan pengalaman selama mengikuti pendidika kesetaraan Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala, para alumni sulit untuk memberikan data wawancara. Mereka merasa malu ketika cerita lama mereka di Kejar Paket C diungkit kembali kepada orang asing seperti penulis. Hal ini disebabkan, kehidupan para alumni saat ini sudah jauh lebih baik berkat ijazah yang mereka peroleh melalui Kejar Paket C. Ijazah tersebut telah berhasil mengantarkan mereka menuju kesuksesan melalui cara kenaikan pangkat atau golongan di pekerjaan mereka.

Bahkan ketika penulis menelusuri rekam jejak alumni yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pihaknya tidak bisa menerima kedatangan penulis dengan baik. Justru menganggap penulis sebagai orang dari media tertentu yang ingin meliput politik di daerah Kabupaten Batang semasa mantan anggota DPR tersebut menjabat. Terlebih ketika penulis mengungkapkan keingintahuan mengenai pendidikan Kejar Paket C yang pernah dijalani mantan anggota DPR tersebut. Pihaknya semakin sulit untuk didekati dalam sekali-dua kali pendekatan. Mantan anggota DPR tersebut mengaku malu, sebab ijazah yang dimiliki hanya sebatas ijazah kesetaraan SMA sederajat. Ketakutan lain dari mantan anggota DPR tersebut yaitu apabila penulis merupakan orang dari Dinas Pendidikan yang sedang melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan iajzah yang diperoleh melalui Kejar Paket C.

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan *triangulasi sumber*. *Triangulasi sumber* yang digunakan disini meliputi: dalam hal ini akan diperoleh dengan jalan : (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil

wawancara. (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. (3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. (4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Sementara dalam menganalisis data, penulis menggunakan tahap analisis data Miles dan Huberman. Tahap tersebut dimulai dengan pengumpulan data di lapangan, reduksi data dengan memilah data yang diperlukan sesuai fokus penelitian dengan yang tidak diperlukan, penyajian data dengan menganalisis menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural Robert K Merton dan Teori Labelling Howard S Becker. Setelah melalui tahap penyajian data, selanjutnya penulis memberikan verifikasi atau kesimpulan dari penerapan program pendidikan kesetaraan Kejar Paket C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latarbelakang *Disorientasi* Warga Belajar, Alumni dan Tutor Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala

1. Keterbatasan Ekonomi dan Kepentingan Pencapaian Status Sosial

Kemunculan Kejar Paket C (KPC) Widya Wiyata Mandala menjadi babak baru variasi dunia pendidikan di wilayah Kecamatan Batang, khususnya pendidikan nonformal. KPC menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat Kabupaten Batang yang mengalami kendala untuk mengenyam pendidikan setingkat SMA sederajat melalui jalur formal. Pelaksanaannya yang fleksibel banyak diminati warga belajar baik dari kalangan usia belajar jenjang SMA, usia telat belajar jenjang SMA, sampai usia yang seharusnya tidak lagi belajar dalam jenjang SMA.

Warga belajar yang mendaftar di KPC Widya Wiyata Mandala berasal dari latar belakang yang bermacam-macam. Diantaranya ada yang setelah lulus dari jenjang SMP sederajat memilih

melanjutkan ke KPC, ada yang karena di DO (Drop Out) atau sengaja keluar dari jenjang SMA sederajat jalur formal, bahkan ada yang sudah bekerja dan berkeluarga. KPC Widya Wiyata Mandala memang berperan sebagai pendidikan alternatif bagi masyarakat, akan tetapi untuk mendaftar menjadi warga belajar tetap dikenakan biaya pendaftaran. Biaya yang harus dikeluarkan calon warga belajar yang akan mendaftar sebesar Rp 50.000,00. Setelah membayar biaya pendaftaran, calon warga belajar KPC Widya Wiyata Mandala harus memenuhi persyaratan lain yaitu: (1) Mengisi formulir pendaftaran; (2) Mengumpulkan fotocopy ijazah terakhir yang dimiliki yang sudah dilegalisir; (3) Mengumpulkan pas foto terbaru.

Warga belajar juga harus membayar SPP yang dibayarkan per bulan sebesar Rp 35.000,00. Biaya yang dikeluarkan warga belajar tidak berhenti sampai disitu. Mereka harus membayar uang semesteran ketika akan menghadapi Ujian Semester sebesar Rp 60.000,00. Ada juga biaya untuk mengikuti Ujian Nasional (UN), biaya ini khusus warga belajar kelas XII ketika sudah mendekati UN, jumlahnya sebesar Rp 500.000,00.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2010, sub bab sasaran program tentang prioritas peserta didik Program Paket C yang dibiayai dari APBN, seharusnya tidak semua warga belajar diwajibkan membayar biaya pendidikan. Berdasarkan prioritas tersebut warga belajar yang berasal dari keluarga miskin baik laki-laki maupun perempuan dan berusia minimal 15 tahun ketika mendaftar berhak mendapatkan biaya dari APBN. Hal ini berarti warga belajar yang masuk kategori prioritas dibebaskan dari biaya pendidikan Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala dan dapat mengakses pendidikan tersebut secara gratis.

Kenyataannya, hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan bagi pihak pengelola KPC. Pihak pengelola tidak melakukan pendataan terhadap warga

belajar yang berhak memperoleh prioritas biaya APBN dan yang tidak berhak. Hal ini menimbulkan ketidakadilan pelayanan bagi warga belajar KPC Widya Wiyata Mandala yang belum bekerja atau hanya memiliki pekerjaan serabutan dan berasal dari keluarga tidak mampu. Jika dibandingkan dengan warga belajar dengan usia tua yang sudah bekerja dan tentu sudah memiliki kemapanaan dalam hal finansial, kondisi ini sangat tidak menguntungkan warga belajar dengan usia muda tersebut.

Ada dua faktor yang menjadi alasan warga belajar KPC Widya Wiyata Mandala mengikuti pendidikan kesetaraan Kejar Paket C, diantaranya:

a. Faktor ekonomi

KPC memberikan keringanan dalam masalah pembiayaan. Berbeda dengan sekolah reguler yang membutuhkan biaya dengan jumlah besar untuk bisa mengenyam pendidikan setingkat SMA sederajat. Warga belajar dengan alasan ekonomi banyak berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka tergolong dalam usia belajar jenjang SMA (16-18 tahun). Melanjutkan ke jalur Kejar Paket C sebenarnya bukan menjadi keinginan warga belajar usia muda. Jika mereka memiliki kesempatan dan kemampuan dalam pembiayaan, mereka lebih memilih untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA jalur formal. Kenyataannya pendidikan di Indonesia ini memang belum dapat diakses bagi semua kalangan, meskipun jelas tertulis dalam Pasal 31 ayat 1 UUD'45 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Merujuk pada bunyi pasal 31 ayat 1 UUD'45, pendidikan kesetaraan Kejar Paket C belum bisa dikatakan sebagai pendidikan yang layak bagi warga belajarnya, utamanya mereka yang masih berusia muda. Warga belajar dengan usia muda masih sangat membutuhkan pendidikan yang benar-benar layak. Pendidikan yang mampu memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri melalui potensi yang dimiliki. Mengembangkan daya berpikir

yang liar dan memperoleh ilmu yang cukup dari para tutor. Merasakan suasana kelas yang hidup sehingga merangsang sikap dan pemikiran kritis mereka serta pengalaman belajar yang semestinya memang harus mereka peroleh. Hal itu semua tidak diperoleh warga belajar usia muda di KPC Widya Wiyata Mandala.

Pelayanan tutor dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) sangat kurang. Transfer ilmu yang seadanya dari tutor, kemantapan kelas yang kurang dalam melaksanakan pembelajaran menjadikan warga belajar menjadi asal-asalan dalam mengikuti proses pembelajaran. Warga belajar dengan usia antara 16-18 tahun kecewa dan menyesal mengikuti pendidikan kesetaraan KPC. Hal ini dikarenakan pelayanan yang diperoleh tidak maksimal. Akhirnya, orientasi mereka tidak lagi memikirkan proses pembelajaran dalam rangka memperoleh ilmu, namun mengalami *disorientasi* untuk sekedar memperoleh selebar ijazah dan legalitas kata "LULUS".

b. Faktor kepentingan

Warga belajar dengan usia di atas 25 tahun banyak yang sudah bekerja di bidang pekerjaan dengan kategori mapan dan menjanjikan. Ada juga yang sudah menjadi PNS. Disinilah letak alasan mereka mengikuti KPC di Widya Wiyata Mandala. Terlihat jelas bahwa mereka memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri ketika bersedia melanjutkan sekolah ke Paket C. Tuntutan persyaratan untuk kenaikan pangkat atau golongan demi karir kerja yang lebih baik menjadi alasan utama. Mereka membutuhkan ijazah setara SMA untuk mewujudkan kepentingan tersebut.

Tidak adanya persyaratan batasan umur bagi calon pendaftar. Hal ini memberikan peluang yang luas bagi masyarakat yang ingin mengakses pendidikan kesetaraan. Peluang tersebut dimanfaatkan oknum-oknum warga belajar sebagai alat untuk mendapatkan ijazah. Pelaksanaan KPC Widya Wiyata Mandala yang tidak terikat dan cenderung bebas memudahkan mereka para pemilik kepentingan mengakses pelayanan

pendidikan secara asal-asalan. Pemilik kepentingan disini tidak hanya berasal dari mereka para PNS, namun juga para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menginginkan jabatan kursi wakil rakyat. Para pengejar kekuasaan dan jabatan tersebut tidak memiliki ijazah SMA sederajat sebagai syarat pencalonan DPR. Melalui Kejar Paket C inilah mereka bagaikan mendapatkan "*jalan tol bebas hambatan*" untuk mewujudkan kepentingan.

Ironis ketika sebuah lembaga pendidikan nonformal yang pada awalnya bertujuan untuk membantu masyarakat dengan keterbatasan ekonomi tidak bisa mengenyam pendidikan SMA sederajat pada jalur formal, kini menjadi batu loncatan dan alat yang dimanfaatkan oknum-oknum dengan *hidden orientation* yang mereka bawa ke Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala. Sementara itu, bagi warga belajar yang masih muda dan pekerjaan tetap pun belum punya semakin tergeser keberadaannya. Mereka semakin sulit mengakses pendidikan yang layak, yang memang mereka butuhkan di usia muda. Bukankah ini menjadi sebuah diskriminasi dalam sebuah kebijakan semu?

2. Merekrut Tutor: Sebuah Pengabdian (Semu) atau Batu Loncatan Sertifikasi

Oknum selalu muncul dalam penerapan sebuah kebijakan. Tidak terkecuali unsur tutor dalam pendidikan kesetaraan KPC Widya Wiyata Mandala. Tidak semua tutor di KPC Widya Wiyata Mandala memiliki alasan pengabdian ketika bersedia menjadi tutor. Ada juga mereka yang bersedia menjadi tutor untuk memanfaatkannya sebagai syarat sertifikasi. Disinilah letak *disorientasi para tutor*. Tutor dengan alasan sertifikasi adalah tutor yang masih menjadi guru muda di sekolah formal tempat mereka mengajar, termasuk juga tutor yang baru masuk menjadi pengajar di KPC Widya Wiyata Mandala. Penambahan jam mengajar menjadi syarat sertifikasi. Peluang mengajar di KPC dimanfaatkan para tutor yang menginginkan sertifikasi. Imbasnya, kinerja mereka mengajar di KPC Widya Wiyata Mandala tidak dijalankan sepenuh hati.

Terlebih waktu dan tenaga mereka harus terbagi dari pagi (mengajar di sekolah formal) sampai sore hari (mengajar di KPC). Tentu saja, KPC hanya mendapatkan pelayanan seadanya dari sisa-sisa tenaga tutor dalam mengajar.

Disorientasi yang terjadi pada warga belajar, alumni maupun tutor dianalisis menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Robert K. Merton. Keberadaan KPC Widya Wiyata Mandala di Kecamatan Batang memberikan fungsi *manifest* berupa: (1) Akses pendidikan yang terjangkau bagi warga masyarakat Kecamatan Batang yang membutuhkan; (2) KPC Widya Wiyata Mandala juga meningkatkan kesempatan masyarakat Batang yang belum mengenyam pendidikan atau terkendala untuk mengakses pendidikan tingkat SMA sederajat jalur formal; (3) KPC Widya Wiyata Mandala membantu warga masyarakat Batang yang dikeluarkan atau Drop Out dari jenjang SMA reguler untuk tetap bisa bersekolah.

Disisi lain keberadaan KPC Widya Wiyata Mandala menimbulkan fungsi *latent* bagi warga belajar, tutor, maupun alumni. Hal ini dapat dilihat dari faktor kepentingan yang menjadi alasan warga belajar dan alumni mengikuti pendidikan kesetaraan KPC serta kesediaan tutor mengajar di KPC. Fungsi tersembunyi KPC yang muncul bagi para alumni adalah mereka memperoleh kemudahan dalam mendapatkan ijazah yang dibutuhkan untuk mewujudkan kepentingan mereka. Kepentingan tersebut seperti peningkatan golongan dalam pekerjaan dan karir yang mereka inginkan. Fungsi tersembunyi yang lahir tersebut dimanfaatkan oknum-oknum warga belajar dan alumni yang hanya berkeinginan untuk mengejar ijazah semata. Terbukti dengan adanya data alumni yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Batang ketika masih bersekolah di KPC. Warga belajar tahun ajaran 2014/2015 pun banyak yang berasal dari mereka yang bekerja di pemerintahan Kabupaten maupun instansi milik pemerintah.

Fungsi *latent* lainnya yang muncul bagi para tutor yaitu dimanfaatkan untuk peningkatan jam kerja sebagai syarat sertifikasi.

Utamanya bagi para tutor yang di sekolah reguler tempat mereka bekerja belum pengangkatan sertifikasi. Imbasnya, kinerja para tutor yang memanfaatkan keberadaan KPC Widya Wiyata Mandala untuk syarat sertifikasi mengalami penurunan. Pengabdian mulia tutor untuk pendidikan nonformal yang memang membutuhkan jasa mengajar mereka menjadi tergeser dengan iming-iming sertifikasi.

Fungsi *latent* yang muncul dari keberadaan KPC Widya Wiyata Mandala melahirkan disfungsi dari lembaga pendidikan tersebut. Keinginan yang hanya ingin mengejar selebar ijazah sudah menjadi rahasia umum dalam dunia pendidikan nonformal kesetaraan Kejar Paket C. Pihak pendiri, pengelola, dan tutor sudah mengetahui hal tersebut, namun mereka tidak melakukan upaya pengembalian fungsi dan tujuan yang benar dari lembaga pendidikan Kejar Paket C yang mereka dirikan.

Kecurangan dan Penyimpangan yang Terjadi dalam Penerapan Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala

Tutor tidak berpedoman pada silabus dan rencana pembelajaran yang dibuat secara jelas sesuai Standar Isi Pendidikan Kesetaraan untuk setiap pertemuan KBM di kelas. Hal ini dikarenakan dari pihak pendiri pun tidak menghimbau para tutor untuk menyiapkan pembelajaran sebaik dan semenarik mungkin. Pihak tutor sendiri tidak ada keinginan untuk mempersiapkan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan terarah. Tidak ada kesepakatan antara tutor dengan warga belajar mengenai materi apa yang akan disampaikan disetiap pertemuan. Alur pembelajaran hanya diketahui dan dipahami oleh tutor, sementara warga belajar hanya menjadi pendengar materi pelajaran yang disampaikan. KBM yang berlangsung lebih sering mengarah pada pembelajaran satu arah, dimana tutor adalah penentu penyampaian materi dan tidak ada partisipasi aktif dari warga belajar dalam menerima materi pelajaran.

Pelaksanaan KBM di KPC Widya Wiyata Mandala berbeda jauh dengan sekolah SMA sederajat pada jalur formal. KBM di KPC Widya Wiyata Mandala sering kosong di setiap

pertemuan tanpa ada alasan yang jelas dari pihak pengelola KPC. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ketidakhadiran tutor dan warga belajar. Kesibukan para tutor di luar kegiatan mengajar KPC Widya Wiyata Mandala menjadi alasan yang selalu diungkapkan pihak pengelola ketika warga belajar menanyakan penyebab sekolah diliburkan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Waktu pelaksanaan KBM setelah libur semester satu juga mengalami kemunduran dua minggu dari aturan yang dilaksanakan oleh sekolah formal. Seharusnya warga belajar masuk kembali pada tanggal 5 Januari 2015, namun karena alasan tutor yang sibuk dengan urusan sekolah formal di tempat mereka bekerja, kegiatan belajar mengajar baru dimulai pada tanggal 19 Januari 2015.

Ketidakjelasan perihal kehadiran tutor dalam proses KBM dan penyampaian materi yang sangat seadanya berefek pada tingkat kehadiran warga belajar yang semakin berkurang setiap minggunya. Warga belajar mengakui bahwa mereka terkadang hanya berangkat seminggu dua kali atau bahkan sekali. Kurangnya pelayanan tutor dalam pembelajaran di kelas menjadikan warga belajar lebih memilih membolos sekolah untuk digunakan bekerja.

Model pembelajaran yang digunakan para tutor KPC Widya Wiyata Mandala dalam menyampaikan materi pelajaran lebih ke ceramah monoton. Hal ini berdampak pada tidak menimbulkan semangat belajar di kalangan para warga belajar. Terlebih sebagian dari mereka baru saja pulang dari bekerja yang masih dalam kondisi lelah sehingga tidak siap untuk belajar. Bahkan ada pula tutor yang menerapkan model pembelajaran dengan mendikte materi pelajaran kepada para warga belajar. Banyak tutor di KPC Widya Wiyata Mandala yang tidak komunikatif dengan warga belajar ketika menyampaikan materi pelajaran.



Gambar 1. Kondisi saat KBM Berlangsung.

Sumber: Dokumentasi penelitian, tahun 2015.

Tutor tidak memiliki respon yang baik dengan kondisi kelas. Tidak peduli para warga belajar memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan atau tidak. Tutor hanya melakukan penyampaian materi, bahkan tutor juga tidak peduli warga belajar sudah paham dengan materi pelajaran yang disampaikan atau belum. Ibaratnya, warga belajar yang datang ke sekolah adalah gelas kosong sehingga tutor hanya mengisi gelas tersebut sampai penuh. Pada akhirnya materi pelajaran yang disampaikan oleh tutor menimbulkan ketidakpuasan dikalangan warga belajar KPC Widya Wiyata Mandala.

Persiapan sebelum pembelajaran secara matang dan terstruktur menjadi keharusan yang dilakukan para tutor KPC Widya Wiyata Mandala. KPC memang hanya jenjang pendidikan nonformal penyetaraan sekolah SMA formal, namun tutor harus tetap memperhatikan persiapan yang memang butuh dilakukan sebelum pelaksanaan KBM. Tidak hanya menuruti kesan yang penting lulus dan kehadiran tidak penting seperti yang sudah terkonstruksi di masyarakat sejak dahulu. Hal ini dikarenakan masih ada warga belajar yang memang benar-benar menginginkan proses KBM yang sesuai dengan prosedur pelaksanaan pada jalur pendidikan formal SMA sederajat. Keinginan dari warga belajar untuk bisa merasakan proses pembelajaran yang sesuai dengan prosedur pelaksanaan tentu menjadi prioritas yang harus dipertimbangkan tutor untuk melakukan persiapan yang lebih terstruktur dan terarah daripada mengutamakan *mindset* “*percuma menyiapkan perangkat*

pembelajaran, mau dipersiapkan pun kehadiran warga belajar tidak penuh”.

Materi *pelajaran* yang diberikan oleh KPC Widya Wiyata Mandala kepada para warga belajar hanya sebatas materi pelajaran akademik SMA. Warga belajar tidak memperoleh materi ketrampilan atau vokasional seperti pelatihan-pelatihan yang dapat dimanfaatkan untuk bekal mereka mencari kerja setelah lulus dari KPC. Hal ini sebenarnya menjadi kebutuhan bagi warga belajar yang belum memiliki pekerjaan tetap. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2010, pihak pengelola wajib memiliki kemitraan atau kerjasama dengan Dunia Usaha untuk proses pembelajaran maupun praktek. KPC merupakan pendidikan setara SMA sederajat, artinya juga menyangkut jenjang SMK, sehingga pembelajaran ketrampilan memang seharusnya diadakan. Kemitraan tersebut bertujuan sebagai tempat praktek warga belajar yang memang membutuhkan pelatihan kerja untuk bekal mereka setelah lulus dari KPC Widya Wiyata Mandala.

Memperoleh materi ketrampilan saat proses pembelajaran menjadi hak yang seharusnya diperoleh warga belajar KPC Widya Wiyata Mandala sesuai yang tertulis dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2010 sub bab Hak dan Kewajiban warga belajar. Selama ini program pembelajaran yang dimiliki di KPC Widya Wiyata Mandala Kecamatan Batang hanya pembelajaran akademik. Warga belajar KPC Widya Wiyata Mandala utamanya yang masih muda tanpa pekerjaan tetap tidak pernah melakukan magang atau praktek untuk menambah keahlian mereka menghadapi dunia kerja. Memberikan materi ketrampilan fungsional menjadi penekanan dalam sebuah pendidikan kesetaraan Kejar Paket C. Tentu hal ini menjadi sebuah keharusan yang wajib dijalankan pengelola lembaga pendidikan kesetaraan.

Kehadiran warga belajar menimbulkan kesan yang penting datang dan presensi. Warga belajar juga jarang mencatat materi pelajaran yang disampaikan tutor di setiap pertemuan. Banyak dari mereka tidak pernah membawa

buku tulis dalam setiap pertemuan KBM untuk mencatat materi yang disampaikan tutor. Buku paket penunjang yang seharusnya diberikan oleh pihak pengelola untuk membantu memperdalam materi pelajaran juga tidak dimiliki warga belajar. Model presensi kehadiran di KPC Widya Wiyata Mandala menggunakan tanda tangan seperti perkuliahan. Model presensi kehadiran inilah memunculkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan warga belajar. Adanya syarat kehadiran harus 75% untuk bisa mengikuti UAS, menjadikan warga belajar berusaha menandatangani penuh presensi kehadiran setiap bulannya meskipun tidak masuk sekolah secara rutin sesuai jadwal. Kecurangan ini disebut dengan rapel tanda tangan. Ada pula yang tidak pernah tanda tangan karena ketika proses KBM tidak pernah berangkat, mereka menandatangani presensi kehadiran selama 6 bulan atau satu semester penuh. Hal ini dilakukan seminggu sebelum UAS. Rapel tandatangan selama satu semester tersebut dilakukan ketika pihak pendiri KPC mengumpulkan seluruh warga belajar sebelum pelaksanaan UAS untuk memberikan pengarahan.



Gambar 2. Presensi Rapel Bulan Juni 2015.

Sumber: Dokumentasi penelitian, tahun 2015.

Warga belajar yang banyak tidak hadir dalam setiap proses pembelajaran di KPC Widya Wiyata Mandala bertentangan dengan kewajiban peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran Program Paket C yang tertulis dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun 2010 sub bab Hak dan Kewajiban. Tertulis jelas bahwa poin pertama kewajiban bagi warga belajar KPC adalah mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kenyataannya, kewajiban itu tidak dilakukan oleh warga belajar KPC Widya Wiyata Mandala.

Terkait bahan ajar atau buku paket penunjang yang tidak dimiliki warga belajar KPC Widya Wiyata Mandala, hal ini tidak sesuai dengan aturan penyelenggaraan Kejar Paket C seperti yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Tahun 2010. Idealnya, bahan ajar baik akademik maupun ketrampilan diadakan dan dibuat oleh pihak pengelola. Pengelola bersama tutor merancang buku penunjang yang berisikan materi yang sesuai Standar Isi Pendidikan Kesetaraan untuk disampaikan kepada warga belajar. Bahan ajar berupa buku penunjang yang wajib dimiliki warga belajar paling tidak satu buku untuk masing-masing mata pelajaran. Kenyataannya, sampai saat ini warga belajar KPC Widya Wiyata mandala tidak memperoleh buku penunjang tersebut. Hal ini berdampak pada kurangnya penguasaan materi pelajaran tingkat SMA sederajat yang diperoleh warga belajar dari KPC Widya Wiyata Mandala.

Kejar Paket C yang dijalani para warga belajar Widya Wiyata Mandala hanya sebatas formalitas. Akhirnya memunculkan istilah “cuma seolah-olah sekolah”. Materi yang disampaikan tutor tidak pernah dibaca kembali oleh warga belajar ketika di rumah, warga belajar hampir tidak pernah belajar mengulang materi. Belajar untuk persiapan UTS dan UAS saja tidak dilakukan warga belajar, apalagi belajar mengulang materi pelajaran yang sudah disampaikan. Hal ini dikarenakan, warga belajar memiliki banyak urusan di luar aktivitas sekolah mereka di KPC, mengingat banyak dari mereka yang sudah bekerja.

Kondisi UAS yang umumnya terjadi di sekolah SMA formal berbanding terbalik dengan kondisi kelas ketika UAS di KPC Widya Wiyata Mandala. Kondisi pada saat UAS sangat bebas, warga belajar dibebaskan untuk saling mencotek. Mereka juga diperbolehkan berpindah tempat duduk untuk mencari jawaban dari sesama warga belajar. Tutor yang menjadi pengawas UAS membiarkan kondisi UAS seperti yang sudah dijelaskan tersebut, meskipun terlihat dengan

“mata telanjang” usaha untuk mencontek dari warga belajar.

Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum dalam dunia pendidikan nonformal khususnya Kejar Paket C. Stigma yang terbangun mengenai pemahaman warga belajar tentang KBM hanya sekedar presensi dan tidak memperdulikan proses-proses yang harus dilewati untuk mendapatkan nilai. Sistem penilaian dari evaluasi berupa UTS dan UAS tidak memberikan perbedaan dalam pemberian nilai antara warga belajar yang memang pandai dan rajin berangkat dengan warga belajar yang hanya mengandalkan jawaban dari warga belajar lain dan kehadiran hanya dirapel dalam presensi. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan warga belajar sudah sangat apatis untuk melakukan persiapan sebelum KBM, karena pada akhirnya evaluasi berupa UTS dan UAS yang dikerjakan para warga belajar pun tidak dengan sungguh-sungguh diterapkan oleh pengelola maupun tutor KPC Widya Wiyata Mandala. Sistem penilaian yang tidak sesuai dengan prosedur penilaian menimbulkan stereotype atau pelabelan tentang kualitas dari warga belajar KPC Widya Wiyata Mandala. Pada akhirnya semakin memberikan penguatan bahwa KPC hanyalah “seolah-olah sekolah”. Hal ini juga semakin melanggengkan konstruksi bagi warga belajar KPC Widya Wiyata Mandala bahwa sekolah KPC hanya mengejar ijazah dan nilai.

No.	Kategori	Nilai	Pengetahuan	Angka	Nilai	Nilai Rata-rata
1	Mata Pelajaran	75	80	85	80	80
2	Pendidikan Agama	75	80	85	80	80
3	Pendidikan Kewarganegaraan	75	80	85	80	80
4	Bahasa Indonesia	75	80	85	80	80
5	Bahasa Inggris	75	80	85	80	80
6	Matematika	75	80	85	80	80
7	Ilmu Pengetahuan Alam	75	80	85	80	80
8	Ilmu Pengetahuan Sosial	75	80	85	80	80
9	Seni Budaya	75	80	85	80	80
10	Kejuruan	75	80	85	80	80
11	Kejuruan	75	80	85	80	80
12	Kejuruan	75	80	85	80	80
13	Kejuruan	75	80	85	80	80
14	Kejuruan	75	80	85	80	80
15	Kejuruan	75	80	85	80	80
16	Kejuruan	75	80	85	80	80
17	Kejuruan	75	80	85	80	80
18	Kejuruan	75	80	85	80	80
19	Kejuruan	75	80	85	80	80
20	Kejuruan	75	80	85	80	80

Gambar 3. Nilai Rapor Warga Belajar Usia Dewasa yang Tidak Pernah Belajar (selalu di atas KKM)

Sumber: Dokumentasi penelitian, tahun 2015.

Proses KBM yang seadanya baik dalam penyampaian materi, pertemuan tatap muka, keseriusan tutor dalam mengelola kelas seperti yang sudah dipaparkan di atas menimbulkan *nonfunctions*. Konsep *nonfunctions* dalam teori Fungsionalisme Struktural Merton tersebut didefinisikan sebagai akibat-akibat yang sama sekali tidak relevan dengan sistem yang sedang diperhatikan. Pada akhirnya pendidikan kesetaraan Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala tidak berfungsi setara dengan SMA sederajat reguler. Kesetaraan yang diembel-embelkan untuk Kejar Paket C nyatanya tidak mampu menghasilkan setara dalam berbagai aspek. Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala tidak memberikan fungsi pendidikan yang seharusnya dari segi kualitas warga belajar. Pelaksanaan tatap muka pembelajaran masih sangat jauh dari kata setara dengan SMA reguler, sebab tatap muka di KPC Widya Wiyata Mandala lebih banyak kosong atau libur tanpa alasan yang jelas dan logis. Pelaksanaan tatap muka pembelajaran sering kali tidak tepat waktu, justru warga belajar hanya memperoleh pelajaran yang tidak sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ada.

Nonfunctions tersebut muncul karena dipengaruhi oleh faktor tidak disiplin dan tidak tegasnya pengelolaan yang diterapkan oleh pihak KPC Widya Wiyata Mandala. Pendidikan sejatinya mampu memberikan fungsi bagi peserta didik untuk mengembangkan karakter yang bermartabat, sikap dan moral yang baik, mengembangkan *potensi* dan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Pada kenyataannya, pendidikan kesetaraan KPC Widya Wiyata Mandala Kecamatan Batang justru mengembangkan karakter licik dan *opportunistis* bagi warga belajarnya, membentuk ketidakjujuran dalam watak warga belajar ketika melakukan presensi kehadiran. Akhirnya, *mindset* warga belajar KPC Widya Wiyata Mandala lebih mementingkan hasil berupa selebar ijazah daripada proses pembelajaran. Tidak heran jika ketika pembelajaran di kelas warga belajar banyak

yang tidak memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan tutor.

Pengelolaan dan penerapan KPC Widya Wiyata Mandala yang tidak didasarkan pada *kebutuhan* warga belajar memunculkan kecemburuan sosial diantara warga belajar yang berusia muda dengan yang sudah bekerja. Warga belajar yang belum memiliki pekerjaan tetap semakin terpinggirkan dengan warga belajar yang sudah menjadi PNS atau memiliki pekerjaan tetap di instansi pemerintahan. Keseriusan yang awalnya dimiliki warga belajar dengan usia muda dalam menempuh pendidikan KPC semakin bergeser. Mereka merasa sia-sia apabila rajin berangkat sekolah, jika warga belajar lain yang sudah *memiliki* pekerjaan mapan saja jarang berangkat tetapi nilai mereka tetap bagus.

Dilihat dari bentuk-bentuk kecurangan dan penyimpangan pada proses KBM memang sangat penuh tanda tanya jika dibandingkan dengan track record alumni setelah lulus. Pada proses KBM memang tidak ada keseriusan yang dilakukan oleh warga belajar maupun alumni KPC Widya Wiyata Mandala. Nilai yang diperoleh mereka sangatlah kontras dengan proses KBM yang dijalani. Nilai yang diperoleh dalam UN juga tergolong sebagai nilai yang sesuai dengan batas kelulusan. Hal ini sesuai dengan hasil pencarian yang dilakukan penulis kepada para alumni ketika mereka diminta untuk menunjukkan ijazah dan nilai-nilai yang tertera dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).



Gambar 4. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Alumni.

Sumber: Dokumentasi Penelitian, tahun 2015.

Track record para alumni juga menjadi output yang bagus bagi KPC Widya Wiyata Mandala. Beberapa alumni yang penulis temui, sekarang memiliki jabatan atau kenaikan golongan yang lebih baik setelah lulus dari KPC Widya Wiyata Mandala. Pada saat proses pembelajaran memang sangat kurang dan persiapan yang dilakukan tutor sebelum mengajar juga tidak maksimal, namun KPC tersebut tetap mampu menghasilkan output yang bagus. Hal ini menjadi tanda tanya besar dan semakin menguatkan bahwa yang dicari para warga belajar maupun alumni adalah selembat ijazah yang menjadi “alat pamungkas” untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka.

Penguatan dari pernyataan tersebut dengan adanya alumni yang sudah berhasil menjadi carik desa dan sudah pengangkatan PNS, perangkat desa, pegawai BAPPEDA maupun TNI yang sudah naik golongan, bahkan alumni KPC Widya Wiyata Mandala juga berhasil mengantarkan alumninya menjadi anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tingkat Kabupaten Batang. Tidak ada kemampuan yang dimiliki para alumni sebenarnya, namun output yang bagus tersebut juga dipengaruhi oleh input yang dibawa oleh

para alumni dan warga belajar terkait dengan kepentingan-kepentingan mereka.

Berdasarkan pemaparan hasil temuan di atas penulis mengkaitkannya dengan teori labeling Howard Becker. Analisis dengan teori labeling ini merupakan analisis yang digunakan untuk menyimpulkan keseluruhan hasil temuan penulis dalam penelitian ini. Teori labeling menjadi teori klimaks untuk mengcover seluruh analisis yang telah dilakukan mengenai temuan-temuan penulis.

Penerapan program KPC Widya Wiyata Mandala dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan. Tujuan sebenarnya dari pendidikan kesetaraan Kejar Paket C pada dasarnya baik, namun individu-individu yang tergolong dalam pelaku pendidikan kesetaraan melakukan berbagai bentuk penyimpangan. Penyimpangan yang dilakukan sudah pada tahap penyimpangan sekunder, yang mana dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku penyimpangan Paket C. Penyimpangan yang dilakukan merupakan suatu bentuk dari hasil “konspirasi masyarakat” dalam membentuk *stereotype* pelaku baik penyelenggara, tutor bahkan warga belajar.

Kejar Paket C merupakan pendidikan kesetaraan nonformal yang sudah *terlanjur* mendapat pelabelan dari masyarakat Kabupaten Batang pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai pendidikan yang hanya mengejar ijazah. Pendidikan yang terlabel sebagai pendidikan fleksibel dan memang “biangnya” kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan ijazah. Apabila hendak diupayakan untuk benar-benar setara dengan SMA sederajat jalur formal sangat susah. Stigma yang tertanam dalam *mindset* warga belajar, tutor dan bahkan pengelola sendiri mengenai Kejar Paket C yang *terlanjur* salah kaprah susah untuk dirubah dalam hitungan jari.

Masyarakat *terlanjur* memberikan cap untuk Kejar Paket C yang hanya sebagai sarana memperoleh ijazah tanpa dibarengi dengan kompetensi lulusan. Hal ini menjadikan warga belajar maupun alumni yang pernah mengenyam pendidikan kesetaraan di KPC Widya Wiyata Mandala menjadi seperti yang dicapkan masyarakat. Definisi yang diciptakan

masyarakat atau kelompok *masyarakat* tertentu tentang Kejar Paket C dalam penilaian negatif, pada akhirnya melanggengkan penyimpangan demi penyimpangan untuk terus dipraktekkan pelaku pendidikan Kejar Paket C. Artinya *self-image* atau *self definition* yang diperoleh Kejar Paket C dari masyarakat secara permanen telah terkunci dan mendapatkan penguatan sebagai pendidikan yang penuh penyimpangan negatif.

Segala bentuk kecurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan program pendidikan kesetaraan Kejar Paket C di Widya Wiyata Mandala bukan berarti harus dibiarkan begitu saja. Label yang sudah terlanjur melekat pada Kejar Paket C sebagai pendidikan “*KW*” atau kualitas rendahannya sebenarnya masih bisa direkonstruksi melalui cara yang tidak mudah tentunya. Pihak yang memiliki kewajiban mutlak disini tentu saja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang sebagai instansi pemerintahan dalam bidang pemerintahan. Evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan, pelayanan, dan pengelolaan yang diterapkan Kejar Paket C di wilayah Kabupaten Batang, khususnya Kejar paket C Widya Wiyata Mandala wajib untuk mulia dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang. Jika Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang melakukan evaluasi, pihaknya juga dapat menjadi saluran untuk memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Batang terkait pemberian dana dan perhatian untuk Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala.

Dengan demikian, pihak terkait pelaksanaan pendidikan kesetaraan Kejar Paket C yang berada dibawah isntansi pemerintahan seperti pendiri, pengelola, maupun tutor Kejar Paket C Widya Wiyata Mandala dapat melakukan perbaikan dalam hal manajemen pengelolaan, manajemen pelayanan, manajemen pengajaran, serta manajemen keuangan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Akses pendidikan Kejar Paket C dimanfaatkan oknum-oknum warga belajar untuk memperoleh ijazah dalam rangka

mencapai kepentingan untuk mewujudkan status sosial yang lebih tinggi (meningkatkan golongan dalam pekerjaan, persyaratan menjadi anggota DPR) dan mencapai mobilitas sosial vertikal. Para tutor yang ingin mendapatkan sertifikasi guru, kesempatan mengajar di Kejar Paket C dimanfaatkan sebagai persyaratan sertifikasi untuk penambahan jam mengajar; (2) Bentuk penyimpangan dalam penerapan program pendidikan Kejar Paket C di Widya Wiyata Mandala diantaranya kecurangan rapel tanda tangan presensi kehadiran warga belajar, jam pelajaran yang sering kosong tanpa alasan yang jelas, pelayanan mengajar tutor ketika di kelas yang masih jauh dari kata layak, materi ketrampilan yang tidak diperoleh warga belajar, pelaksanaan UAS yang dibebaskan dalam contek-mencontek, serta pengkatrolan nilai UAS dan UTS di raport.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada : (1) Warga belajar kelas XII Tahun Pelajaran 2014/2015 di KPC Widya Wiyata Mandala Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengumpulan data dan kesediaan waktu untuk diwawancara; (2) Bapak Jubijono Solichin selaku pendiri KPC Widya Wiyata Mandala yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis; (3) Ibu Nurul Fatimah S.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu mengarahkan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Dadi dan H, Aliyah Nur'aini. 2005. Teori Penjulukan. *Mediator*. V6. N2. Hal 297-301.
<http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1209/739>.
- Becker, Howard S. 1963. *Outsiders: Studies in The Sociology of Deviance*. New York: The Free Press.
- Depdiknas. 2006. *Acuan Proses Pelaksanaan dan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Kesetaraan Dirjen PLS Depdiknas.

(SKB) Kota Malang. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN).

- Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. 2010. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Egbezor, Daniel Elemchukwu dan Okanezi Bright. 2008. Non-Formal Education as a Tool to Human Resource Development: An Assessment. *International Journal of Scientific Research in Education*. V1. N1. Hal 26-40. <http://www.ijre.com/Vol1Issue1-Egbezor&Okanezi.pdf>.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI PRESS.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2011. *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Kencana.
- Schaefer, Richard T. 2005. *Sociology Ninth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Winata, I Nyoman Mursa. 2012. *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Setara SMA) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Widya Sentana" Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2011/2012*. Tesis. Singaraja: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha.
- Zakiyyah, Aini. 2008. *Efektivitas Pelaksanaan Program Kejar Paket C Guna Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA Sederajat Di Sanggar Kegiatan Belajar*